

# Aliansi Amerika Serikat dengan Jepang dalam Kebijakan Rebalancing di Kawasan Asia Pasifik 2011-2016

Agustinus Tri Darma Kusuma<sup>1)</sup>, Idin Fasisaka<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: agustinustd@unud.ac.id, idinfasisaka@unud.ac.id, kawitriresen@unud.ac.id

## ABSTRACT

*This research aimed to describe United States' strategic alliance towards Japan. As China's economic has rapidly grown, its military capability has also increased. United States saw this phenomenon as a threat and also an opportunity. United States then announced the rebalancing policy as a response to the rise of China. Rebalancing strategy provided United States to do certain approaches to Asia Pacific countries. Those approaches were aimed to United States' partners and also China. Japan has been one of the United States' strategic partners in Asia Pacific. The military relations between United States and Japan are based on the Japan-U.S. Security Treaty. Japan is also one of the United States' partner that has issues involving China. United States' military protection of Japan is essential regarding to Japan's territorial dispute with China. United States implemented rebalancing policy to Japan through military and economy aspects.*

**Keywords:** *Rebalancing strategy, United States, Japan, rise of China*

## 1. PENDAHULUAN

Dinamika di kawasan Asia Pasifik tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok telah mengubah keseimbangan power secara global. Meskipun Amerika Serikat masih menjadi kekuatan yang dominan di Kawasan Asia Pasifik, pengaruhnya di kawasan kian tersaingi oleh kebangkitan Tiongkok (Zhao, 2016). Kebangkitan Tiongkok didorong oleh perkembangan perekonomian secara pesat.

Jika dilihat secara GDP, Tiongkok mengalami pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan GDP Tiongkok mencapai 6,7% per tahun sejak tahun 1950. Angka tersebut meningkat menjadi 8,3% per tahun dalam periode tahun 1978 sampai 2007 (Xie &

Page, 2010). Di tengah krisis keuangan global pada tahun 2011, Tiongkok masih mampu menaikkan GDP dari US\$ 4,2 menjadi US\$ 8,3 miliar. Kenaikan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai peringkat kedua dalam pertumbuhan ekonomi setelah Amerika Serikat (Planifolia, 2017).

Seiring dengan meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok, perkembangan di bidang politik dan militer juga turut meningkat. Perekonomian yang kuat mendorong dilakukannya pemutakhiran persenjataan militer. Tiongkok kini telah memiliki kapabilitas pertahanan Anti Access/Area Denial. Kekuatan ekonomi Tiongkok juga memungkinkan Tiongkok untuk melakukan upaya-upaya diplomatis serta memberi bantuan luar negeri. Mempererat hubungan dagang, bantuan luar

negeri, dan investasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara lain (Xie & Page, 2010).

Dalam merespon kebangkitan Tiongkok, Amerika Serikat melakukan upaya meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik (Zhao, 2016). Upaya tersebut dilakukan dalam bidang ekonomi, militer serta diplomasi (Yahuda & Rowman, 2014). Tujuan Amerika Serikat di bidang keamanan dipertegas oleh pernyataan wakil presiden, Joe Biden. Joe Biden mengemukakan bahwa Amerika Serikat ikut menjaga keamanan di kawasan Asia Pasifik (The White House Office of the Vice President, 2013). Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat hubungan militer dengan mitra aliansinya. Hubungan ekonomi juga diperkuat melalui Trans Pacific Partnership. Pendekatan tersebut dilakukan dengan pendekatan secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Tiongkok. Strategi Amerika Serikat ini disebut juga dengan rebalancing atau pivot to Asia. Upaya rebalancing yang dilakukan pemerintahan Obama menggunakan pendekatan yang kolaboratif dengan Tiongkok dan di saat yang bersamaan membatasi perilaku Tiongkok yang mengancam. Tujuan utama upaya tersebut bukanlah untuk melakukan containment terhadap Tiongkok, melainkan untuk melakukan constrainment (Stephens, 2012). Strategi rebalancing merupakan kerjasama Amerika Serikat baik dengan aliansinya maupun dengan Tiongkok untuk membentuk tatanan regional yang memungkinkan Tiongkok untuk tetap

bangkit namun tetap mencegahnya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

Selain Amerika Serikat, negara-negara tetangga Tiongkok juga tidak dapat melepaskan kekhawatirannya dari kebangkitan Tiongkok. Negara-negara tersebut akan melakukan segala cara untuk dapat menghalau Tiongkok mencapai hegemoni di kawasan Asia Pasifik (Mearsheimer, 2007). Roy (2014) mengatakan bahwa terdapat dua kemungkinan terkait kebangkitan Tiongkok. Pertama, Tiongkok akan mencoba untuk mencapai hegemoni regional dengan cara kekerasan. Kedua, kebangkitan Tiongkok akan memicu respon dari Jepang (Roy, 2014).

Jepang menjadi salah satu aliansi Amerika Serikat yang menjadi negara tujuan diimplementasikannya kebijakan rebalancing. Jepang menjadi salah satu sekutu Amerika Serikat yang sekaligus memiliki persoalan dengan Tiongkok. Perlindungan militer dari Amerika Serikat terhadap Jepang dapat dikatakan penting mengingat ancaman teritorial dan ancaman militer dari Tiongkok. Secara historis, Jepang dan Tiongkok terlibat dalam sengketa kepulauan Senkaku. Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari teritorial Tiongkok sejak masa dinasti Tiongkok yang digunakan sebagai wilayah penangkapan ikan. Kepulauan Senkaku adalah jalur perdagangan serta memiliki potensi penambangan minyak dan gas (Metraux, 2013).

Sengketa Kepulauan Senkaku memanas dalam beberapa dekade terakhir. Upaya normalisasi hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok pernah dilakukan pada

tahun 1972. Akan tetapi sengketa Jepang dengan Tiongkok atas kepulauan Senkaku semakin memanas setelah kapal nelayan Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli Jepang pada tahun 2010 di perairan Senkaku (McCurry, 2010). Insiden tersebut kembali memicu perselisihan di antara kedua negara. Guna meredakan ketegangan antar kedua negara, Jepang memutuskan untuk membeli kepulauan tersebut secara privat pada tahun 2012 (BBC News, 2012). Hingga pada bulan November 2013, Tiongkok mengumumkan Air Identification Zones (ADIZ) yang mengikutsertakan kepulauan yang bersengketa (The New York Times, 2013). Sengketa kedua negara ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk mengambil sikap tegas.

Pemerintahan sebelum Presiden Obama belum pernah mengambil sikap tegas terkait sengketa Kepulauan Senkaku. Barulah pada bulan April 2014, Presiden Obama menyatakan secara resmi bahwa Amerika Serikat akan menguatkan komitmennya terhadap perjanjian keamanan dengan Jepang (Mayin, 2016). Amerika Serikat dan Jepang terikat dalam perjanjian keamanan yaitu Japan-U.S. Security Treaty yang telah disepakati sejak 1960 (Chanlett-Avery & Rinehart, 2016). Perjanjian tersebut mengharuskan Amerika Serikat untuk melindungi Jepang dari ancaman luar batas negaranya. Tindakan Amerika Serikat ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan rebalancing. Kebijakan rebalancing membawa pembaharuan terhadap aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang. Kebijakan rebalancing juga menjadi salah satu

bentuk komitmen Amerika Serikat dalam meningkatkan aliansi dengan Jepang serta sebagai upaya Amerika Serikat dalam menekan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Tulisan Mearsheimer (2007) pada buku yang ditulis oleh Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith menjadi kajian pustaka pertama yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Tulisan ini secara khusus menjelaskan kebangkitan Tiongkok melalui pandangan realisme struktural. Maksud utama dari tulisan tersebut adalah kebangkitan Tiongkok menimbulkan kecurigaan bagi negara lain, baik Amerika Serikat sebagai super power maupun negara-negara sekutunya.

Kebangkitan Tiongkok dapat dijelaskan melalui dua perspektif. Mearsheimer (2007) melihat peristiwa kebangkitan Tiongkok dari perspektif realisme ofensif dan defensif. Melihat dari perspektif realisme ofensif, Mearsheimer (2007) memandang bahwa setiap negara memiliki keinginan untuk menjadi hegemoni di kawasannya. Negara yang menjadi hegemoni memiliki tujuan lebih jauh, yaitu untuk mencegah negara lain yang berkekuatan besar untuk menyaingi posisinya sebagai hegemoni. Dengan kata lain, situasi ideal bagi negara berkekuatan besar adalah menjadi satu-satunya hegemoni di kawasan.

Mearsheimer (2007) juga menggambarkan kebangkitan Tiongkok melalui perspektif realisme defensif. Realisme defensif memandang bahwa sistem internasional memicu negara untuk memiliki power yang lebih sehingga negara dapat melakukan survival.

Melihat dari kaca mata realisme defensif, kebangkitan Tiongkok adalah upaya Tiongkok dalam memindahkan balance of power untuk kepentingan survival. Baik Amerika Serikat maupun negara-negara tetangga Tiongkok harus melakukan balancing sehingga Tiongkok tetap terawasi. Realisme defensif melihat kompetisi keamanan akan tetap terjadi.

Tulisan kedua mampu mendukung penelitian ini dalam mendeskripsikan upaya Amerika Serikat untuk meredam kebangkitan Tiongkok, penulis menggunakan jurnal berjudul *Delicate Balance of Power in the Asia Pacific: The Obama Administration's Strategic Rebalance and the Transformation of US-China Relationship* karya Suisheng Zhao (2016). Tulisan Zhao (2016) ini mencoba memberi penjelasan mengenai balance of power antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Zhao (2016) berpandangan bahwa meskipun Amerika Serikat secara eksplisit mengatakan bahwa kebijakan rebalancing bukanlah upaya untuk meredam Tiongkok, meskipun ketidakpercayaan terhadap hal tersebut datang dari Tiongkok. Jurnal yang ditulis Zhao (2016) secara garis besar berargumen bahwa kebijakan rebalancing merupakan sebuah upaya jangka panjang Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat membangun kerjasama dengan Tiongkok dengan tujuan untuk membetuk tatanan regional yang memungkinkan Tiongkok untuk tetap meningkatkan kekuatannya namun tidak menggunakannya dengan semena-mena.

Balance of power dari sisi Amerika Serikat terbilang cukup rumit (Zhao, 2016). Di satu sisi, Amerika Serikat harus memegang peranan penting dalam mempererat aliansi dengan negara-negara mitra aliansinya sehingga dapat mengimbangi kebangkitan Tiongkok. Di sisi lain, pendekatan balance of power mengharuskan Amerika Serikat untuk berbagi kepemimpinan dengan Tiongkok. Hal ini tentu mengkhawatirkan Amerika Serikat akan adanya kekuatan yang menggeser hegemoninya. Seperti halnya ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Pasifik dengan Jepang dan Perang Dingin dengan Soviet. Maka dari itu, Amerika Serikat memandang kebangkitan Tiongkok sebagai suatu ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat di Kawasan (Kissinger, 2012). Dalam hal ini, kebijakan rebalancing yang dilakukan Obama cenderung ke arah diplomasi yang bermain aman. Kebijakan tersebut menawarkan pendekatan yang kolaboratif dengan Tiongkok. Tujuan utama dari rebalancing adalah untuk melakukan constrain ketimbang containment terhadap Tiongkok (Stephens, 2012).

Bukan perkara yang mudah bagi Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoni di kawasan tersebut. Akan tetapi Tiongkok masih dianggap sebagai revisionis oleh negara-negara maritime di Asia Pasifik. Sebaliknya, mayoritas negara-negara di Asia Timur menyambut baik keberadaan militer Amerika Serikat. Bagi Tiongkok, negosiasi diplomasi masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa ketimbang menggunakan kekerasan. Hubungan antara

Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya menjadi kunci sukses dalam pemerintahan Obama, namun juga menjadi penentu perdamaian jangka Panjang di kawasan Asia Pasifik (Zhao, 2016).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat memaparkan penerapan strategi aliansi Amerika Serikat dengan Jepang terkait kebijakan *rebalancing*. Metode analisis deskriptif kualitatif dikatakan paling sesuai dengan penelitian ini karena metode ini mendorong penulis untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder atau tidak langsung berdasarkan literatur-literatur terkait. Data sekunder yang digunakan penulis berupa jurnal ilmiah, buku, serta situs resmi yang dikelola pemerintah. Buku yang digunakan penulis seperti *The Concept of Military Alliance*, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, *An Introduction to Modern National Security Processes and Problems*, *Unity and Disintegration in*

*International Alliances*, serta *Asia Pacific Countries and the US Rebalancing Strategy*. Penulis juga menggunakan jurnal ilmiah yang terkait Ilmu Hubungan Internasional. Beberapa diantaranya seperti *The U.S.-Japan Alliance*, *Delicate Balance of Power in the Asia-Pacific:*

*The Obama Administration's Strategic Rebalance and the Transformation of US-China Relationship*, dan *The Level-of-Analysis Problem in International Relations*. Penelitian ini juga menggunakan data yang didapat dari situs resmi yang dikelola pemerintahan seperti situs milik Department of Defense dan Obama White House Archives. Selain itu penulis juga menggunakan situs berita seperti BBC, New York Times dan The Guardians.

Dalam penelitian ini, digunakan unit analisis berupa negara, yaitu Amerika Serikat. Negara dipergunakan sebagai unit analisis dikarenakan mampu menjelaskan strategi Amerika Serikat terhadap Jepang terkait kebijakan *rebalancing* pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

### 4. PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian Tiongkok diawali ketika diberlakukannya reformasi ekonomi pada tahun 1979 hingga tahun 2012. Reformasi perekonomian Tiongkok dikenal juga dengan *open door policy*. Kebijakan tersebut meliputi dekollektifisasi agrikultur, membuka diri terhadap investasi asing, dan pemberian ijin usaha kepada pihak swasta (Wei, 1995). Pertumbuhan GDP Tiongkok mencapai angka rata-rata 10% tiap tahunnya (Morrison, 2013).

Tiongkok mengalami pertumbuhan GDP yang signifikan. Angka pertumbuhan GDP Tiongkok mencapai rata-rata 6,7% per tahun sejak tahun 1950. Angka tersebut meningkat menjadi 8,3% per tahun dalam periode tahun 1978 sampai 2007 (Xie & Page, 2010). Meskipun perekonomian global mengalami krisis keuangan pada tahun 2011, Tiongkok

masih mampu menaikkan GDP dari US\$ 4,2 menjadi US\$ 8,3 miliar. Kenaikan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai peringkat kedua dalam pertumbuhan ekonomi setelah Amerika Serikat (Planifolia, 2017).

Perkembangan perekonomian Tiongkok kemudian berkontribusi terhadap modernisasi militernya. Tiongkok mengumumkan anggaran militernya pada tahun 2010 yang mencapai US\$ 78,5 miliar (Cordesman & Kendall, 2016). Angka tersebut dinilai tidak valid oleh pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat berpandangan bahwa Tiongkok mengeluarkan biaya lebih banyak dari jumlah yang dipublikasikan. Meskipun begitu, data anggaran militer Tiongkok yang dipublikasikan memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan anggaran militer tersebut berkaitan erat dengan modernisasi militer Tiongkok. Tiongkok kini telah memiliki kemampuan pertahanan Anti-access Area Denial (A2/AD). A2/AD merupakan strategi militer yang bertujuan untuk mencegah pasukan musuh untuk masuk ke dalam teritorial Tiongkok (Permal, 2014). Teknologi yang digunakan dalam strategi A2/AD meliputi rudal balistik yang memiliki kemampuan untuk mengenai target yang bergerak di air, surface-to-air missiles (SAMs) dan pesawat dengan anti-ship cruise missiles (ASCMs). Strategi A2/AD sendiri dilakukan oleh angkatan laut Tiongkok yang dikenal dengan nama People's Liberation Army Navy (PLAN).

Tiongkok juga mengumumkan Air Defense Identification Zone (ADIZ) pada November 2013 (Rinehart & Elias, 2015). ADIZ yang dikeluarkan

Tiongkok meliputi kawasan Laut Tiongkok Timur yang di dalamnya terdapat kepulauan yang disengketakan oleh Jepang, Taiwan dan Tiongkok sendiri. Hal ini dilakukan Tiongkok tanpa adanya perundingan secara formal dengan negara-negara yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok akan melakukan tindakan militer terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan ADIZ.

Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakui ADIZ yang dikemukakan Tiongkok. Jepang, Korea Selatan dan Taiwan juga menyuarakan oposisi terhadap Tiongkok terkait ADIZ. Negara-negara tersebut tetap melakukan aktifitas militer di kawasan ADIZ. Korea Selatan sempat meminta Tiongkok untuk menarik kembali batas-batas ADIZ-nya pada tahun 2013, namun Tiongkok menolak permintaan tersebut. Jepang juga sempat melakukan upaya yang sama dengan Korea Selatan namun Tiongkok tetap bersikeras memberlakukan ADIZ sesuai dengan yang sebelumnya diumumkan (Rinehart & Elias, 2015).

Tindakan-tindakan Tiongkok tersebut mendatangkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Tiongkok berpotensi untuk menggeser keseimbangan power Asia Pasifik yang kini dipegang Amerika Serikat. Maka dari itu, Amerika Serikat pada tahun 2011 perpindahan fokus Amerika Serikat dari Timur Tengah menuju Asia Pasifik. Amerika Serikat memandang bahwa kawasan Asia Pasifik patut dijadikan prioritas geostrategi Amerika Serikat. Perpindahan fokus Amerika Serikat ke Asia Pasifik kemudian dikenal dengan nama pivot to

Asia atau rebalancing. Melalui kebijakan tersebut Amerika Serikat mencoba untuk meningkatkan peranannya di kawasan Asia Pasifik (Manyin, et al., 2012). Upaya ini dilakukan melalui pendekatan militer, ekonomi, serta kebijakan luar negeri.

Peningkatan fokus Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik kemudian diimplementasikan melalui bidang militer. Sesuai dengan poin kelima pernyataan Clinton, sisi militer dari kebijakan rebalancing cenderung menekankan pada persebaran militer di kawasan. Amerika Serikat juga mengupayakan pembentukan kapabilitas militer baru hal tersebut meliputi kemampuan untuk mengatasi kemampuan Tiongkok dalam strategi A2/AD. Selain itu, peningkatan keamanan siber dan kemampuan operasi di luar angkasa juga ditingkatkan.

Amerika Serikat melakukan latihan militer yang berfokus pada penguatan hubungan dengan aliansinya, memperluas jaringan, dan persiapan pasukan militer terhadap kemungkinan ancaman (Saunders, 2014). Latihan ini meliputi 18 latihan militer bersama, aktivitas antar lembaga, dan membangun mitra dengan 30 negara. Pasukan Amerika Serikat juga ikut serta dalam lebih dari 150 latihan militer di Asia Pasifik setiap tahunnya.

Jepang menjadi mitra yang penting bagi Amerika Serikat khususnya dalam upaya melakukan balancing terhadap Tiongkok. Hubungan keamanan antara Amerika Serikat dengan Jepang didasari oleh perjanjian Japan-U.S. Security Treaty. Aliansi tersebut dibentuk saat okupasi Amerika Serikat terhadap Jepang

pasca Perang Dunia II. Okupasi Amerika Serikat terhadap Jepang awalnya dimaksudkan untuk melakukan demilitarisasi terhadap Jepang. Konstitusi Jepang yang pada saat itu dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan bahwa Jepang tidak akan mengoperasikan angkatan bersenjata. Amerika Serikat menjamin keamanan wilayah Jepang dari ancaman luar. Hal ini diatur dalam artikel V dalam perjanjian Japan-U.S. Security Treaty (Japan-U.S. Security Treaty). Era Perang Dingin kemudian mendorong Amerika Serikat untuk membentuk Jepang sebagai pangkalan keamanannya demi melawan Soviet. Pasca perang Korea pada tahun 1950, Amerika Serikat mendorong pembentukan kekuatan militer Jepang. Barulah pada tahun 1954 terbentuk angkatan bersenjata Jepang yang bernama Self-Defense Forces (SDF).

SDF dan U.S. Forces bekerjasama di bawah kerangka kerja Japan-U.S. Security Arrangements. Kerangka kerja tersebut mengatur peran masing-masing negara dalam merespon ancaman terhadap Jepang. Lebih lanjut lagi, SDF dan U.S. Forces melaksanakan latihan militer secara rutin guna meningkatkan kredibilitas dan deterrence kedua negara. Selain latihan militer, aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat juga meliputi riset dan pembangunan teknologi militer seperti pembangunan rudal balistik yang telah dicanangkan pada tahun 1999.

Pembangunan rudal balistik Jepang merupakan salah satu respon Amerika Serikat dan Jepang terhadap ancaman nuklir dari negara-negara sekitar termasuk Korea Utara

dan Tiongkok (Swaine, Swanger, & Kawakami, 2001). Rudal yang dikembangkan Amerika Serikat dan Jepang mampu mencegat rudal jelajah yang dimiliki Korea Utara dan Tiongkok. Meskipun Korea Utara beberapa kali melakukan uji coba nuklir hingga memasuki perairan Jepang, Tiongkok memiliki kapabilitas dan jumlah rudal balistik yang lebih dibandingkan Korea Utara. Tiongkok memiliki rudal tipe MRBM CSS-2 dan MRBM CSS-5 berhulu ledak nuklir yang mampu mencapai Jepang (Swaine, Swanger, & Kawakami, 2001).

Selain pembangunan teknologi militer, keberadaan pasukan Amerika Serikat di Jepang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan deterrence. Penempatan pangkalan Amerika Serikat di wilayah Jepang memungkinkan Amerika Serikat untuk dapat merespon situasi genting dengan cepat. Bekerjasama dengan SDF, pasukan Amerika Serikat memiliki peranan sebagai kekuatan ofensif dalam merespon ancaman terhadap Jepang. Amerika Serikat menempatkan sekitar 50.000 pasukan di 90 fasilitas militer yang terletak di Jepang (Chanlett-Avery, Manyin, Nelson, Williams, & Yamanaka, 2017).

Jepang juga merupakan sekutu Amerika Serikat yang sekaligus memiliki persoalan dengan Tiongkok. Perlindungan militer dari Amerika Serikat terhadap Jepang dapat dikatakan penting mengingat ancaman teritorial dan ancaman militer dari Tiongkok. Secara historis, Jepang dan Tiongkok terlibat dalam sengketa kepulauan Senkaku. Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari teritorial Tiongkok sejak

masa dinasti Tiongkok yang digunakan sebagai wilayah penangkapan ikan. Kepulauan Senkaku adalah jalur perdagangan serta memiliki potensi penambangan minyak dan gas (Metraux, 2013).

Sengketa Kepulauan Senkaku memanas dalam beberapa dekade terakhir. Upaya normalisasi hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok pernah dilakukan pada tahun 1972. Akan tetapi sengketa Jepang dengan Tiongkok atas kepulauan Senkaku semakin memanas setelah kapal nelayan Tiongkok bertabrakan dengan kapal patroli Jepang pada tahun 2010 di perairan Senkaku (McCurry, 2010). Insiden tersebut kembali memicu perselisihan di antara kedua negara. Guna meredam ketegangan antar kedua negara, Jepang memutuskan untuk membeli kepulauan tersebut secara privat pada tahun 2012 (BBC News, 2012). Hingga pada bulan November 2013, Tiongkok mengumumkan Air Identification Zones (ADIZ) yang mengikutsertakan kepulauan yang bersengketa (The New York Times, 2013). Tiongkok beberapa kali kedaapatan memasuki wilayah udara Jepang. Sengketa kedua negara ini kemudian mendorong Amerika Serikat untuk mengambil sikap tegas.

Pemerintahan sebelum Presiden Obama belum pernah mengambil sikap tegas terkait sengketa Kepulauan Senkaku. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Richard Nixon menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak mengambil sikap terkait kedaulatan kepulauan Senkaku (Mayin, 2016). Barulah pada bulan April 2014, Presiden Obama menyatakan secara resmi bahwa Amerika Serikat akan

menguatkan komitmennya terhadap perjanjian keamanan dengan Jepang (Mayin, 2016). Amerika Serikat dan Jepang terikat dalam perjanjian keamanan yaitu Japan-U.S. Security Treaty yang telah disepakati sejak 1960 (Chanlett-Avery & Rinehart, 2016). Perjanjian tersebut mengharuskan Amerika Serikat untuk melindungi Jepang dari ancaman luar batas negaranya. Tindakan Amerika Serikat ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan rebalancing. Kebijakan rebalancing membawa pembaharuan terhadap aliansi antara Amerika Serikat dengan Jepang. Kebijakan rebalancing juga menjadi salah satu bentuk komitmen Amerika Serikat dalam meningkatkan aliansi dengan Jepang serta sebagai upaya Amerika Serikat dalam menekan pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik.

Jepang memainkan peranan penting dalam kebijakan rebalancing Amerika Serikat. Jepang merupakan mitra aliansi Amerika Serikat di Asia Pasifik dengan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat. Hubungan dengan Jepang juga menjadi penting mengingat isu keamanan Jepang dengan Tiongkok. Sejak awal tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Jepang mengambil langkah untuk meningkatkan kapabilitas militernya.

Akhir 2013, Jepang merilis dua dokumen yang merefleksikan kekhawatirannya terhadap ancaman keamanan khususnya sengketa kepulauan dengan Tiongkok (Chanlett-Avery, Manyin, Nelson, Williams, & Yamanaka, 2017). National Defense Program Guidelines (NDPG) menekankan urgensi Jepang untuk meningkatkan kapabilitasnya untuk merespon

ancaman dari Tiongkok dengan membeli peralatan militer yang meningkatkan kapabilitas intelgensi, pengamatan dan pengintaian. NDPG juga mengusung pendekatan yang dikenal dengan Proactive Pacifism. Pendekatan ini mendorong Jepang untuk berperan aktif dalam kegiatan keamanan internasional dengan negara lain.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan rebalancing Amerika Serikat. Abe menyetujui untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer Jepang yang telah lama disarankan oleh Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan konstitusi Jepang khususnya pada artikel 9 (Genser & Brignone, 2015). Perubahan konstitusi ini memungkinkan Jepang untuk melakukan pelatihan keamanan kolektif, mengesahkan undang-undang keamanan yang memungkinkan kerangka kerja legal untuk interpretasi baru, meningkatkan anggaran keamanan Jepang, dan melonggarkan larangan ekspor senjata, meresmikan National Security Council untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, mengesahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan pertukaran intel dengan Amerika Serikat (Chanlett-Avery & Rinehart, The U.S.-Japan Alliance, 2016).

Kebijakan rebalancing Amerika Serikat terhadap Jepang dalam bidang militer secara garis besar terdiri dari tiga hal (Manyin, et al., 2012). Pertama, pendistribusian pasukan secara luas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasukan Amerika Serikat yang bertugas di Jepang semakin ditingkatkan. Kedua,

peningkatan fleksibilitas militer. Peningkatan fleksibilitas militer dilakukan agar dapat merespon ancaman dengan cepat. Ketiga, Meningkatkan kapabilitas militer Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang dilakukan dengan melakukan pemutakhiran terhadap persenjataan dan pembaharuan mekanisme kerjasama kedua negara.

Amerika Serikat dan Jepang kemudian mengumumkan pembaharuan dari aliansi keamanan kedua negara pada April 2015 (Chanlett-Avery & Rinehart, *The U.S.-Japan Alliance*, 2016). Pembaharuan tersebut dituangkan dalam pedoman keamanan. Sebelumnya, pedoman keamanan tersebut sudah dirancang pada tahun 2013. Pertamakali disusun pada tahun 1978 dan diperbaharui terakhir kalinya pada tahun 1997. Pedoman tersebut mengatur interaksi militer antara Amerika Serikat dan Jepang di situasi perang. Pedoman yang baru tersebut meliputi pembangunan dalam teknologi militer, respon terhadap ancaman di era modern, peningkatan interoperabilitas dari militer Amerika Serikat dan Jepang.

Pedoman keamanan yang baru juga meliputi kerangka kerjasama bilateral dengan Jepang terkait keamanan wilayah kepulauan Jepang. Pembaharuan pedoman keamanan tersebut juga meningkatkan cakupan dari Japan-U.S. Security Treaty yang kini mengikutsertakan perathanan terhadap wilayah laut. Kedua negara juga mendorong kontribusi Jepang terhadap operasi militer Amerika Serikat di luar wilayah Asia Timur (Chanlett-Avery & Rinehart, *The U.S.-Japan Alliance*, 2016).

Pemerintahan Abe mengupayakan legislasi yang cukup kontroversial, yaitu perubahan konstitusi yang memungkinkan Jepang untuk beroperasi di luar wilayah negaranya.

Amerika Serikat juga menegaskan rebalancing terhadap Jepang melalui Joint Statement of the U.S.-Japan Security Consultative Committee (2+2) pada bulan Oktober 2013. Jepang dan Amerika Serikat mengonfirmasikan bahwa dilakukan pengiriman alutsista yang lebih modern ke Jepang untuk menggantikan alutsista yang sebelumnya digunakan. Modernisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas militer terhadap Jepang. Pengiriman alutsista tersebut meliputi MV-22 Osprey, P-8 pesawat patroli, Global Hawk, dan F-35B. Pada bulan Desember 2013, enam pesawat patroli P-8 dikirim oleh U.S. Navy ke pangkalan udara Amerika Serikat di Pangkalan Udara Kadena di Okinawa. Pesawat patroli P-8 yang lebih modern merupakan pergantian dari pesawat patroli P-3. MV-22 Osprey dikirim untuk menggantikan helikopter CH-46. MV-22 Osprey merupakan pesawat yang memiliki kemampuan untuk terbang dan mendarat secara vertikal sehingga memiliki kemampuan manuver yang lebih baik ketimbang helicopter sebelumnya. Pesawat tanpa awak Global Hawk juga dikirim ke Pangkalan Udara Misawa guna meningkatkan kemampuan intelejensi Amerika Serikat. Sedangkan F-35B dikirim untuk menggantikan pesawat tempur F-16 (Japan Ministry of Defense, 2014). Pengiriman pesawat Amerika Serikat ke pangkalan di Jepang ini memiliki keterkaitan dengan pengembangan pesawat

tempur J-20 dan J-31 oleh Tiongkok yang diklaim sebagai pesawat tempur generasi baru.

Amerika Serikat dan Jepang juga mengedepankan pertahanan melalui rudal balistik. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim radar AN/TPY-2 dan rudal Patriot PAC-3 ke pangkalannya di Jepang. Kemudian pada Japan-U.S. Summit Meeting Februari 2013, kedua negara menyetujui untuk menambah jumlah radar TPY-2 di Jepang untuk meningkatkan kapabilitas rudal balistik (Ministry of Defense, 2014). Pada Joint Statement of the U.S.-Japan Security Consultative Committee (2+2), Jepang menegaskan akan menyediakan fasilitas bagi Amerika Serikat untuk menempatkan tambahan radar AN/TPY-2. Rudal AN/TPY-2 maupun rudal Patriot PAC-3 diharapkan mampu mencegat rudal balistik seperti yang dimiliki oleh Tiongkok.

Kebijakan rebalancing Amerika Serikat terhadap Jepang juga ditunjukkan melalui penegasan dukungannya terhadap Jepang terkait sengketa Kepulauan Senkaku. Meskipun Amerika Serikat tidak mengambil posisi terkait kedaulatan atas sengketa kepulauan tersebut, Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap berkomitmen terhadap Article V dalam Japan-U.S. Security Treaty (McCurry, 2014). Amerika Serikat berharap kepada Tiongkok untuk melakukan resolusi secara damai tanpa adanya tindakan-tindakan yang membahayakan kestabilan keamanan di kawasan.

Sengketa Kepulauan Senkaku menambah tantangan Amerika Serikat untuk melakukan pendekatan terhadap Tiongkok

sekaligus meningkatkan kekuatan aliansinya terhadap Jepang. Padahal, jika melihat pada artikel Foreign Policy yang dikeluarkan Hillary Clinton menyebutkan bahwa kebijakan rebalancing menekankan pada penguatan dengan mitra aliansi Amerika Serikat dan memprdalam dengan kekuatan baru termasuk Tiongkok.

Modernisasi militer Amerika Serikat dan Jepang serta penegasan sikap Amerika terkait sengketa kepulauan Senkaku dapat dilihat sebagai penerapan strategi aliansi dengan Jepang terkait kebijakan rebalancing. Modernisasi militer dengan Jepang ini sesuai dengan poin pertama yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton terkait kebijakan rebalancing yang menekankan pada penguatan mitra Amerika Serikat di Asia Pasifik. Modernisasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Jepang sendiri terdiri dari tiga garis besar, yaitu peningkatan persebaran militer dengan menambah armada dan jumlah pasukan; peningkatan fleksibilitas melalui mekanisme ACM; peningkatan kapabilitas militer dengan menggantikan alutsista sebelumnya dengan alutsista yang lebih modern.

## **5. KESIMPULAN**

Seperti yang dikemukakan Zhao (2016), kebijakan rebalancing Amerika Serikat merupakan strategi jangka panjang untuk mencapai kepentingannya di Asia Pasifik. Kebijakan rebalancing mengharuskan Amerika Serikat untuk berperan penting dalam mempererat hubungan dengan mitra aliansinya di Asia Pasifik. Di sisi lain, Amerika Serikat harus menyambut kebangkitan Tiongkok yang

dikhawatirkan akan menggeser hegemoninya di Asia Pasifik. Tujuan utama kebijakan rebalancing bukanlah untuk melakukan containment terhadap Tiongkok, melainkan untuk melakukan constrain terhadap Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan Obama yang cenderung untuk tidak melakukan konfrontasi secara langsung terhadap Tiongkok.

Kebangkitan Tiongkok dirasa sebagai sebuah potensi ancaman bagi negara-negara maritime di Asia Pasifik. Mearsheimer (2007) mengatakan bahwa negara-negara yang merasa terancam akan bersekutu untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang melakukan hegemoni untuk memberi potensi ancaman. Amerika Serikat kemudian melakukan pendekatan terhadap mitra aliansinya di Asia Pasifik. Salah satu mitra strategis Amerika Serikat adalah Jepang.

Jika melihat dari konsep aliansi asimetris, Amerika Serikat berperan sebagai negara major sedangkan Jepang dapat dikatakan sebagai negara minor. Modernisasi militer Amerika Serikat terhadap Jepang merupakan bentuk perlindungan Amerika Serikat terhadap Jepang. Jepang sebagai negara minor kemudian mendukung kebijakan rebalancing yang diinisiasikan oleh Amerika Serikat. Melihat dari kasus aliansi Amerika Serikat dengan Jepang dalam kebijakan rebalancing, dapat disimpulkan bahwa negara major dapat mencapai kepentingannya melalui aliansinya dengan negara minor. Negara minor sendiri mendapat keuntungan dari perlindungan yang diberikan oleh negara major. Amerika Serikat dapat menerapkan kebijakan rebalancing

melalui aliansinya dengan Jepang sedangkan Jepang mendapatkan perlindungan militer yang lebih kuat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- BBC News (2012). Japan Government 'reaches deal to buy' Disputed Islands
- Chanlett-Avery, E., & Rinehart, E. I. (2016). The U.S.-Japan Alliance. Congressional Research Service, 2-3.
- Chanlett-Avery, E., Manyin, M. E., Nelson, R. M., Williams, B. R., & Yamanaka, T. (2017). Japan-U.S. Relations: Issues for Congress. Congressional Research Service.
- Cordesman, A. H., & Kendall, J. (2016). Estimates of Chinese Military. Center for Strategic & International Studies, 3-5.
- Japan Ministry of Defense (2014). Japan-U.S. Alliance
- Kissinger, Henry A. (2012). The Future of US-Chinese Relations: Conflict Is a Choice, Not a Necessity. Foreign Affairs
- Manyin, M. E., Dagget, S., Ben, D., Lawrence, S., Martin, M., O'Rourke, R., & Vaughn, B. (2012). Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia. Congressional Research Service, 2.
- Manyin, M. E. (2016). The Senkaku (Diaoyu/Diaoyutai) Dispute. Congressional Research Service.
- McCurry, J. (2010, September 9). Japan-China row escalates over fishing boat collision. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2010>

- 0/sep/09/japan-china-fishing-boat-collision
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural Realism. In T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (pp. 71-87). Oxfordshire: Oxford University Press.
- Metraux, D. A. (2013). The Senkaku Islands Dispute between China and Japan. *Southeast Review of Asian Studies*, 1-2.
- Morrison, W. M. (2013). *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States*. Congressional Research Service, 1-44.
- Permal, S. (2014). China's Military Capability and Anti-access Area-denial Operations. *National Maritime Foundation Vol. 10 No. 2*, 16-32.
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Rinehart, I. E., & Elias, B. (2015). *China's Air Defense Identification Zone*. Congressional Research Service.
- Roy, D. (2014). *Hegemon on the Horizon? China's Threat to East Asian Security*. The MIT Press, 149-168.
- Saunders, P. C. (2014). China's Rising Power, the U.S. Rebalance to Asia, and Implications for U.S.-China Relations. *Issues & Studies*, 19-55.
- Secretary, O. o. (2015, April 28). Remarks by President Obama and Prime Minister Abe of Japan in Joint Press Conference. Retrieved from Obama White House Archives: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/28/remarks-president-obama-and-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference#>
- Stephens, Philip (2012) "Danger in Xi's Rebuff to Obama." *Financial Times*. March 1.
- Torode, Greg and Minnie Chan. 2010. "Summit in US Marks Shift in Wary Region. Sea Disputes Will Be High on Agenda as Obama Meets Asean Leaders." *South China Morning Post*.
- Swaine, Swanger, & Kawakami (2001). *Japan and Ballistic Missile Defense*. Santa Monica: RAND
- Wei, S.-J. (1995). The Open Door Policy and China. In T. Ito, & A. Krueger, *Growth Theories in Light of the East Asian Experience* (pp. 73-104). Chicago: University of Chicago Press.
- Xie, T., & Page, B. (2010). Americans and the Rise of China as a World Power. *Journal of Contemporary China*.
- Yahuda, M., & Rowman, M. Y. (2014). *International Relations of Asia*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Zhao, S. (2016). Delicate Balance of Power in the Asia-Pacific: The Obama Administration's Strategic Rebalance and the Transformation of US-China Relationship. *Economic and Political Studies Vol. 1, No.2*, 109-133.